

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi yang berkualitas					
1.1	Indikator 1.1 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	Triliun	635,89	-	147,5	23,2
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi yang berkualitas					
1.2	Indikator 1.2 Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025	Persentase	100	50	50	100
II	Sasaran Program 2 Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi	Persentase	85	20	20	100
III	Sasaran Program 3 Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,75	125

IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi	Persentase	92	20	20	100

Kinerja Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi yang berkualitas
---	--

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Nilai Realisasi

Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi

Latar Belakang

Peningkatan investasi yang berorientasi pada sektor hilirisasi merupakan salah satu sasaran strategis untuk mendorong realisasi penanaman modal pada industri yang memberikan nilai tambah di dalam negeri. Upaya ini dilakukan melalui penerapan kebijakan yang mendukung kemudahan berinvestasi mencakup penyederhanaan proses perizinan, optimalisasi insentif, serta penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Selain itu, kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dengan regulasi yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan investor baik domestik maupun asing. Dalam konteks ini, akselerasi hilirisasi diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui proses pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal di dalam negeri.

Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi menurut BKPM merujuk pada jumlah investasi yang telah direalisasikan dalam bidang hilirisasi. Bidang hilirisasi sendiri merupakan industri pengolahan sumber daya alam yang terbagi menjadi beberapa sektor komoditas antara lain mineral dan batubara, minyak dan gas, serta perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah dengan deregulasi kebijakan kemudahan berusaha melalui revisi peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan revisi peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal. Deregulasi kebijakan diharapkan dapat mempermudah proses bisnis penerbitan izin usaha dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sehingga mampu menarik investasi dari dalam maupun luar negeri.

Total nilai investasi realisasi di bidang hilirisasi dihitung berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang berasal dari industri pengolahan

sumber daya alam yang disampaikan oleh perusahaan PMA dan PMDN setiap triwulan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 635,89 Triliun. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Dokumen RPJMN tahun 2025-2029. Hingga triwulan I tahun 2026, nilai realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi adalah sebesar 147,5 Triliun atau mencapai 23,2% dari target tahunan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	Triliun	635,89	147,5	23,2%

Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi merupakan *cascading* dari indikator kinerja utama Deputy, yaitu Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang ditargetkan mencapai Rp2.041,3 triliun pada tahun 2026. Berdasarkan laporan triwulan I tahun 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, nilai realisasi investasi bidang hilirisasi tercatat sebesar Rp147,5 triliun atau setara dengan 29,6% dari total realisasi investasi nasional pada periode tersebut. Mengacu pada target tahunan sektor hilirisasi yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN, sebesar Rp635,89 triliun di tahun 2026, realisasi hingga triwulan I telah mencapai Rp147,5 triliun atau 23,2% dari target.

Realisasi investasi pada sektor hilirisasi pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan tren positif. Secara tahunan (YoY), capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sektor mineral tercatat sebagai kontributor utama dengan nilai realisasi investasi mencapai Rp98,3 triliun. Diikuti oleh sektor perkebunan dan kehutanan sebesar Rp29,8 triliun, sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp17,7 triliun, serta sektor perikanan dan kelautan yang menyumbang Rp1,7 triliun.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai Realisasi Investasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi dalam bentuk penyampaian permohonan data/laporan mengenai

	di Bidang Hilirisasi Tahun 2025.		realisasi investasi di bidang hilirisasi tahun 2025 pada tanggal 19 Januari 2026 yang ditujukan kepada Direktur Data dan Informasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
2.	Rapat Koordinasi Penyelesaian Hambatan Investasi di Bidang Hilirisasi: Keberlanjutan Investasi Komoditas Perikanan di Danau Toba.	Terlaksana	• Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Keberlanjutan Usaha Budi Daya Perikanan di Danau Toba pada 10 Februari 2026. • Audiensi dengan Regal Springs Indonesia (PT Aqua Farm Nusantara) pada tanggal 24 Februari 2026 dan Telah diarahkan untuk dilakukan pengaduan melalui kanal P2SP oleh RSI pada tanggal 6 maret 2026
3.	Monev Kebijakan Hilirisasi Komoditas Rumput Laut Dalam Rangka Upaya Substitusi Impor Produk Turunan Rumput Laut.	Terlaksana	Pada 5 Maret 2026 telah dilaksanakan Kunjungan Kerja ke PT Karya Noribet Indonesia dalam rangka monitoring dan evaluasi pemenuhan kebutuhan bahan baku komoditas rumput laut, dengan hasil sebagai berikut: • Perusahaan ini berfokus pada pengolahan rumput laut dengan varian utama <i>Ulva</i> (tropis) dan <i>Porphyra</i> (sub-tropis/impor). • Produk turunan yang dihasilkan berupa nori lembaran, <i>crispy</i>, dan taburan yang dipasarkan ke restoran, industri, ritel di Jawa Barat, UMKM, serta pedagang kaki lima. • Perusahaan menghadapi kendala berupa kapasitas produksi yang masih

			terbatas sehingga permintaan pasar, khususnya untuk varian <i>Ulva</i>, belum dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, keterbatasan modal menghambat penambahan peralatan penting seperti mesin pencucian, pengering, dan pencetak, sementara fasilitas produksi yang tersedia belum memadai dari sisi ruang maupun kelengkapan alat, sehingga membatasi peningkatan volume produksi.
4.	Monev Kebijakan Hilirisasi Komoditas Garam sebagai Bahan Baku dan Penolong Produk Farmasi.	Terlaksana	Telah dilaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Monitoring Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Komoditas Pergaraman di PT Bio Farma (Persero) Bandung, Jawa Barat Pada Tanggal 28-30 Januari 2026, dengan hasil sebagai berikut: - PT Bio Farma (Persero) merupakan produsen vaksin nasional yang berperan strategis dalam mendukung ketahanan kesehatan serta memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri dan pasar ekspor. - Proses produksi vaksin memerlukan bahan baku farmasi terutama garam yang harus memenuhi standar mutu dan spesifikasi khusus. - Perusahaan menghadapi kendala berupa keterbatasan ketersediaan bahan

			baku farmasi dalam negeri yang belum memenuhi kebutuhan dari sisi kualitas, kapasitas, dan harga, sementara kebijakan pembatasan impor berpotensi mengganggu keberlangsungan produksi vaksin. Selain itu, bahan baku farmasi memerlukan perlakuan khusus dalam pengaturan impor dan neraca komoditas, sehingga implementasi hilirisasi perlu dilakukan secara bertahap dan didukung sinkronisasi kebijakan hilirisasi, perdagangan, dan industri untuk menjaga keberlanjutan industri vaksin nasional.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah mengikuti *Groundbreaking* Pabrik Bahan Baku Bio Avtur PT Green Power Palembang di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 19-21 Januari 2026 dengan hasil kegiatan:
 - a. Acara Ground Breaking Pembangunan Pabrik CCO PT Green Power Palembang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani kelapa, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah daerah, mitra internasional, serta pelaku usaha. Kehadiran petani mencerminkan keterkaitan langsung proyek ini dengan penguatan ekonomi masyarakat dan rantai pasok berbasis sumber daya lokal.
 - b. Dipilihnya Kabupaten Banyuasin sebagai lokasi pembangunan dinilai sangat strategis, mengingat wilayah ini merupakan **penghasil kelapa terbesar ke-6 di Indonesia** dengan luas tanam sekitar **56 ribu hektar**. Keberadaan pabrik Bio Avtur diharapkan dapat memperkuat hilirisasi kelapa, meningkatkan nilai tambah komoditas, serta memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat dan petani kelapa.

- c. Terlaksananya Ground Breaking pembangunan pabrik Bio Avtur pertama di dunia dan di Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
 - d. Tersampainya komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang disampaikan oleh Bupati Banyuasin, bahwa pembangunan pabrik ini merupakan momen bersejarah dan strategis bagi daerah serta memberikan harapan besar bagi petani kelapa.
 - e. Penegasan dukungan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian serta dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
2. Telah menghadiri Forum Koordinasi Kebijakan Akselerasi Industri Rumput Laut Terintegrasi & Diseminasi Survei Evaluasi Dampak Sosio – Ekonomi dan Biodiversitas Budidaya Rumput Laut Korporasi Skala Besar 2023 – 2025 pada tanggal 22 Januari 2026 di Hotel Harris FX Sudirman, Jakarta yang diadakan oleh Kementerian Koordinator bidang Pangan dengan pembahasan:
- a. Arah kebijakan pengembangan industri rumput laut nasional dan posisinya dalam rantai nilai global;
 - b. Kebijakan perencanaan dan penguatan hilirisasi rumput laut dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan panjang;
 - c. Program nasional pengembangan rumput laut, termasuk aspek perbenihan, budidaya, pasca panen, dan pengolahan;
 - d. Dukungan kebijakan lintas sektor untuk peningkatan investasi, teknologi, dan infrastruktur industri rumput laut
3. Telah mengikuti Rapat Pembahasan Rancangan Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis pada tanggal 10 Maret 2026 yang diadakan oleh Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan hasil/tindak lanjut:
- a. Rancangan Perpres selaras dengan arah kebijakan Presiden melalui Asta Cita dan Program Prioritas Nasional serta RPJMN 2025-2029.
 - b. Pentingnya melibatkan K/L terkait dan pelaku usaha yang terdampak dalam penguatan substansi pembahasan per komoditas secara detail karena setiap komoditas berbeda tata kelolanya.
 - c. rapat lanjutan akan direncanakan pada April 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi efisiensi tersebut diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, pelaksanaan rapat menggunakan ruang rapat fasilitas kantor, dan pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja menggunakan *cloud* digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Proyeksi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp 201.845.000 (dua ratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas asdep pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Terdapat irisan tugas dan fungsi antara beberapa unit kerja di internal Kemenko Perekonomian, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, duplikasi program, serta kurang optimalnya koordinasi lintas unit dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan menurunkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Dilakukan penyesuaian dan penegasan kembali tugas serta fungsi masing-masing unit kerja melalui mekanisme harmonisasi struktur, klarifikasi mandat, dan pembagian peran yang lebih terukur. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap unit kerja memiliki ruang lingkup tanggung jawab yang jelas, saling melengkapi, serta mendukung koordinasi terpadu dalam perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi. Dengan demikian, potensi irisan dapat diminimalisir, efektivitas kerja meningkat, dan sinergi antar-unit dapat terbangun secara berkesinambungan.

2

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.2. Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025

Latar Belakang

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan salah satu instrumen strategis Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui penyelenggaraan perizinan yang sederhana, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang menjadi dasar pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko secara nasional.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 memerlukan dukungan regulasi dan instrumen pelaksanaan yang memadai agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dan konsisten oleh seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusunan dan penyelesaian regulasi pelaksanaan, khususnya Peraturan Menteri maupun Peraturan Kepala Badan mengenai Standar Kegiatan Usaha serta Standar Produk/Jasa, menjadi langkah penting dalam memberikan kejelasan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam penyusunannya, regulasi dan instrumen pelaksanaan tersebut harus selaras dengan tata cara perizinan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Keselarasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses perizinan memiliki acuan yang seragam, mengurangi potensi perbedaan interpretasi antarinstansi, serta mendukung penerapan prinsip referensi tunggal dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.

Dengan terselesaikannya regulasi dan instrumen pelaksanaan dimaksud, pelaku usaha memperoleh kepastian mengenai persyaratan dan tata cara perizinan, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam memproses perizinan sesuai kewenangannya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100% yaitu penyelesaian 4 (empat) regulasi dan instrumen pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yaitu sektor perhubungan, kebudayaan, energi dan sumber daya mineral, dan kelautan dan perikanan. Adapun target Triwulan I adalah sebesar 50% dengan capaian penetapan 2 (dua) instrumen pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 50% atau mencapai 100% dari target Triwulan I Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025	Persentase	Tahunan: 100 Triwulan I: 50	50	100

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses koordinasi untuk formulasi kebijakan pada triwulan I 2026 sudah sesuai target yang telah ditetapkan pada rencana aksi, dimana telah dilakukan koordinasi penyelesaian regulasi turunan PP 28/2025 pada sektor perhubungan, kebudayaan, energi dan sumber daya mineral, dan sektor lingkungan hidup. Pada triwulan I 2026 telah terbit sebanyak 2 (dua) regulasi turunan PP 28/2025 yaitu pada sektor perhubungan dan sektor kebudayaan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penghimpunan Usulan Perubahan Bidang Usaha pada Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM) dari Kementerian/Lembaga dan Pelaku Usaha.	Terlaksana	• Telah disusun matriks progress usulan K/L terkait perubahan pengaturan bidang usaha pada Perpres BUPM • Telah dilaksanakan review usulan K/L terkait perubahan pengaturan bidang usaha pada Perpres BUPM beserta RIA yang telah disampaikan • Telah dilaksanakan rapat konfirmasi penyesuaian KBLI 2025 pada Revisi Perpres BUPM
2.	Rapat Koordinasi Penyelesaian Permen dan Perka pelaksana PP No.28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko untuk sektor kelautan dan perikanan; sektor energi dan sumber daya mineral; sektor keagamaan; sektor lingkungan hidup, dan subsektor keamanan.	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM pada tanggal 29 Januari 2026 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Penyesuaian Lampiran PP No. 28 Tahun 2025 Sektor Lingkungan Hidup (KBLI 37021 dan 37022) pada tanggal 10 Februari 2026

			Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Dokumen Lingkungan KBLI 36002 dan Progres Revisi Permen KP 10/2021 pada tanggal 30 Maret 2026.
3.	Koordinasi penyelesaian regulasi turunan PP 28/2025 pada sektor perhubungan dan sektor kebudayaan.	Terlaksana	Telah terbit regulasi sektor perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2026, dan regulasi sektor kebudayaan melalui Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi efisiensi tersebut diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, pelaksanaan rapat menggunakan ruang rapat fasilitas kantor, dan pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja menggunakan *cloud* digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Proyeksi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp 201.845.000 (dua ratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas asdep pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Penyelesaian peraturan pelaksanaan PP 28 Tahun 2025 oleh Kementerian/Lembaga masih melampaui target waktu yang telah ditetapkan. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh belum optimalnya komitmen Kementerian/Lembaga pengampu sektor dalam menyelesaikan substansi pengaturan, serta masih terdapat beberapa isu strategis yang memerlukan keputusan pada tingkat pimpinan tinggi

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Diperlukan penguatan komitmen Kementerian/Lembaga pengampu sektor, percepatan pengambilan keputusan pada tingkat pimpinan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan penyelesaian peraturan pelaksanaan sesuai target.

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase

Efektivitas

Sinkronisasi,

Koordinasi, dan

Pengendalian

Kebijakan

Kemudahan

Berinvestasi dan

Akselerasi Hilirisasi

Latar Belakang

Terwujudnya Kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral, yang menjalankan fungsinya sebagai: a) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral; b) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral; c) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral; d) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral; dan e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi. Proses Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya adalah rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih, dan dokumen yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 85% yaitu persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi. Adapun target Triwulan I adalah sebesar 20% dengan capaian penyelesaian tahapan pertama yaitu Perencanaan Kebijakan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 100% dari target Triwulan I Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi	Persentase	Tahunan: 85 Triwulan I: 20	20	100

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses koordinasi untuk formulasi kebijakan percepatan investasi dan hilirisasi pada triwulan I 2026 sudah sesuai target yang telah ditetapkan pada rencana aksi, yang mana telah dilakukan kegiatan penyusunan SK PAK terkait Revisi Perpres BUPM, monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan berusaha di Asosiasi/ Pelaku Usaha, rapat koordinasi tindak lanjut penanaman PP 28/2025 dan Permen/Perka pada Sistem OSS, serta inventarisasi data awal terkait realisasi hilirisasi komoditas rumput laut.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Melakukan identifikasi kendala implementasi pelaksanaan berusaha dengan asosiasi/	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penerapan SNI Wajib untuk Komoditas Impor

	pelaku usaha (investor PMA dan PMDN).		bersama Kemenperin dan Eurocham
2.	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyelesaian Permen dan Perka turunan PP 28/2025 dan penyempurnaan Sistem OSS.	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyampaian Perkembangan Penyelesaian Peraturan Turunan PP 28/2025 oleh Kementerian/Lembaga dan Penyampaian Perkembangan Implementasi Peraturan Turunan PP 28/2025 pada Sistem OSS, tanggal 25 Februari 2026
3.	Penyusunan panitia antar Kementerian (PAK) terkait Revisi Perpres BUPM.	Terlaksana	Telah disusun SK Pembentukan Panitia Antar Kementerian terkait Revisi Perpres BUPM
4.	Melakukan Identifikasi Awal Isu dan Kendala Pengembangan Hilirisasi Komoditas Strategis non-ESDM dan non-Migas.	Terlaksana	Telah disusun identifikasi awal isu dan kendala pengembangan hilirisasi komoditas strategis non-ESDM dan non-Migas, meliputi: • Ikan Tilapia: ◦ Keterbatasan sarana dan prasarana produksi, ◦ Teknologi budidaya dan pengolahan yang belum optimal, ◦ Kualitas SDM yang perlu ditingkatkan, ◦ Perlunya penguatan keberlanjutan investasi. • Rumput Laut ◦ Ketergantungan pada jenis komoditas tertentu,

			○ Produktivitas dan kualitas bahan baku yang belum optimal, ○ Keterbatasan teknologi pengolahan dan inovasi produk hilir, ○ Rendahnya daya saing dan branding produk di pasar global. ● Rempah ○ Produktivitas dan produksi yang masih fluktuatif, ○ Keterbatasan modal dan teknologi pascapanen, ○ Rantai pasok yang belum efisien, ○ Belum optimalnya pemenuhan standar <i>traceability</i>, kualitas SDM, dan data pendukung.
5.	Melakukan Pengumpulan Data Awal terkait Realisasi Investasi Hilirisasi Komoditas Rumput Laut.	Terlaksana	Telah disusun kumpulan data awal terkait realisasi investasi hilirisasi komoditas rumput laut pada TW I 2026 meliputi: ● Produksi 2025: 11,6 Juta Ton ● Nilai produksi 2025: 31,3 Triliun Rupiah ● Ekspor: Capaian ekspor rumput laut pada tahun 2025 sebesar US\$ 315,62 juta terdiri dari US\$ 184,57 juta untuk rumput laut kering dan US\$ 131,05 juta ● Industri: Tersebar di 40 Industri Pengolahan dengan utilisasi Industri 55,01%

			Investasi: Total realisasi investasi hilirisasi rumput laut tahun 2025 mencapai Rp320,5 Miliar
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Pembahasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib untuk Komoditas Impor:
 - a. Rapat ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi dengan the European Business Chamber of Commerce in Indonesia (EuroCham) terkait adanya hambatan penerapan SNI untuk komoditas impor.
 - b. Rapat melibatkan Kementerian Perindustrian sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penerapan SNI serta menghadirkan Eurocham sebagai pihak yang menghadapi kendala dalam pelaksanaan SNI.
 - c. Rapat menyimpulkan dan menyepakati:
 - 1) Kementerian Perindustrian akan menindaklanjuti perihal ketidakpastian persyaratan legalisasi dokumen, keterbatasan pelaksanaan audit pabrik di luar negeri, dan kendala wajib SNI tipe 5 untuk gula kristal rafinasi.
 - 2) Hasil tindak lanjut Kementerian Perindustrian akan dimonitor oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Diskusi bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tegal:
 - a. Diskusi ini sebagai tindak lanjut atas adanya kendala yang dihadapi investor (PT Teng Fei Glory Indonesia) dalam berinvestasi dan berusaha di Kota Tegal.
 - b. Kendala yang dihadapi adalah belum terbitnya Izin Usaha Industri (IUI) PT Teng Fei Glory Indonesia karena permasalahan sinkronisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan Sistem Online Single Submission (OSS).
 - c. Berdasarkan hasil diskusi, kendala tersebut dapat diselesaikan sehingga IUI dapat diterbitkan.
3. Diskusi bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perihal permasalahan perizinan berusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan:
 - a. Permohonan perizinan berusaha dari beberapa pelaku usaha terkendala karena permasalahan aliran data dari Sistem OSS ke Sistem KPBPB Bintan.
 - b. Berdasarkan hasil diskusi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan segera menindaklanjuti permasalahan teknis aliran data tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi efisiensi tersebut diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, pelaksanaan rapat menggunakan ruang rapat fasilitas kantor, dan pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja menggunakan *cloud* digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Proyeksi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp

201.845.000 (dua ratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas asdep pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Keterlambatan penyelesaian peraturan pelaksanaan PP 28 Tahun 2025 oleh Kementerian/Lembaga menghambat implementasi pengaturan dalam sistem OSS.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Diperlukan percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan melalui penguatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, penetapan target penyelesaian yang jelas, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan implementasi PP 28 Tahun 2025 dapat berjalan sesuai jadwal.

4

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi merupakan instrumen evaluatif yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Pengukuran ini dilakukan melalui survei kepada Kementerian, Lembaga, dan stakeholder terkait guna memperoleh umpan balik objektif dan konstruktif.

Survei dilaksanakan menggunakan metode skala Likert dengan rentang nilai 1 hingga 4 dan disebarakan melalui *platform Google Form* untuk menjangkau responden secara luas dan efisien. Hasil survei ini menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan di Keasdepan Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Untuk itu, pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian di bidang percepatan investasi dan hilirisasi yang efektif perlu dilakukan agar dapat memberikan dampak yang optimal berupa kemudahan berusaha,

peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja baru, serta penguatan struktur industri nasional yang berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan investasi dan hilirisasi adalah skala 3 dari 4 (Baik) pada tahun 2026. Target tersebut dapat terealisasi apabila seluruh layanan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi kepada Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait mendapatkan hasil yang memuaskan. Penetapan target kinerja tersebut didasarkan pada hasil dialog kinerja dan arahan dari Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Pada Triwulan I 2026, Keasdepan Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah melaksanakan survei kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan investasi dan hilirisasi melalui pemetaan kembali responden yang terdiri dari para stakeholder maupun mitra kerja sama yang selama ini berkoordinasi dengan Keasdepan Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Nilai indeks yang diperoleh berdasarkan nilai rata-rata dari hasil pelaksanaan survei adalah 3,75 atau kategori puas dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi	Indeks	3 dari 4	3,75	125

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan pada Triwulan I, realisasi Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi mendapatkan hasil 3,75 (Puas).

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan I tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan, yang mana telah dilakukan serangkaian kegiatan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi Triwulan I.

Realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 berhasil dicapai berkat dukungan aktif Kementerian/Lembaga terkait, sehingga koordinasi dalam mengidentifikasi permasalahan kebijakan investasi dan hilirisasi dapat berjalan optimal. Dengan

adanya dorongan serta rekomendasi kebijakan yang berkesinambungan, indeks kepuasan terhadap layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terbukti terpenuhi secara konsisten sepanjang Triwulan I Tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan kuesioner survei, pelaksanaan survei, dan pelaporan survei kepuasan layanan KSP di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi TW.I.	Terlaksana	Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah melakukan survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi melalui <i>Google Form</i> kepada K/L dan Stakeholder terkait pada bulan April 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi efisiensi tersebut diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, pelaksanaan rapat menggunakan ruang rapat fasilitas kantor, dan pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja menggunakan *cloud* digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Proyeksi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp 201.845.000 (dua ratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas asdep pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Beberapa kebijakan yang dihasilkan melalui Rakornis Tingkat Eselon I dan II yang ditindaklanjuti oleh K/L telah terdokumentasi dengan baik. Untuk mendorong peningkatan Indek Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi pada periode berikutnya, Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi saran yang diberikan oleh K/L.

5

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Profesional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase

Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

Asisten Deputi

Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi merupakan presentasi pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Implementasi kegiatan Reformasi Birokrasi General harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU Reformasi Birokrasi yang wajib didukung adalah Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai, Tingkat Maturitas SPIP, SAKIP, Indeks Perencanaan Pembangunan, dan Tingkat Digitalisasi Arsip.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi mencapai 100% dari target Triwulan I tahun 2026 sebesar 20%. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut telah dipenuhi dengan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I, Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Manual IKU, Renaksi, penyusunan dan penetapan Tim Kerja, serta optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI yang dapat diketahui dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	----------------	-----------	-----------

IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi	Persentase	Tahunan: 92 Triwulan IV: 20	20	100
--	------------	---------------------------------------	----	-----

Realisasi Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi pada Triwulan I 2026 mencapai 100% dari target Triwulan I tahun 2026. Capaian tersebut menunjukkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi sudah berjalan dengan baik dengan target Triwulan I sebesar 20%. Target tersebut terpenuhi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dengan kesesuaian kinerja dengan SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.

Pencapaian kinerja Triwulan I tahun 2026 terealisasi dengan baik ditopang dengan dukungan tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Ekonomi yang baik. Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan I untuk mencapai Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dengan melakukan penyusunan dan penetapan tim kerja, penyusunan matriks manajemen risiko, penyusunan laporan kinerja triwulan I, serta optimalisasi pemanfaatan srikandi yang menunjang pemenuhan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 maka Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi Triwulan I Tahun 2026 **terpenuhi**.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penetapan perjanjian kinerja, rencana aksi, dan manual IKU.	Terlaksana	Tim Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah melakukan penetapan

			Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU Tahun 2026.
2.	Penyusunan Laporan Kinerja TW I.	Terlaksana	Tim Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 yang dilaporkan pada 10 April 2026.
3.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW I.	Terlaksana	Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi digital SRIKANDI untuk surat masuk dan keluar.
4.	Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja.	Terlaksana	Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah menyusun 2 (dua) draf Tim Kerja yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi melalui Keputusan Deputi, yaitu: (1) Keputusan Nomor 1 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei <i>Business Ready</i> (B-Ready), ditetapkan pada 2 Januari 2026; dan (2) Keputusan Nomor 2 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Peta Jalan Peningkatan Nilai Tambah Komoditas

			Strategis, ditetapkan pada 2 Januari 2026
--	--	--	---

Pelaksanaan kegiatan sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mengoptimalkan fasilitas kantor dan teknologi. Penyelenggaraan kegiatan secara *offline*, *online*, dan *hybrid* dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi selama tahun 2026 sehingga *output* dapat tercapai sesuai pengalokasian anggaran.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi efisiensi tersebut diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, pelaksanaan rapat menggunakan ruang rapat fasilitas kantor, dan pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja menggunakan *cloud* digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Proyeksi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp 201.845.000 (dua ratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas asdep pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik dan tidak terdapat kendala berarti yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian *output* pada Triwulan I Tahun 2026 telah terpenuhi sesuai target yang telah direncanakan. Adapun upaya perbaikan dalam mencapai target di Triwulan berikutnya yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan RB General ataupun Tematik di Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dengan rencana aksi yang telah disusun.

Jakarta, 10 April 2026

Plt. Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi



(Agus Haryanto)